

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tantangan dan tuntutan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) semakin meningkat, terutama dalam menghadapi situasi global yang ditandai dengan iklim kompetitif yang semakin ketat antar bangsa di dunia. Hanya dengan kepemilikan kualitas dan daya saing SDM yang tinggi suatu bangsa dapat bersaing dan merebut sumber daya yang terbatas, serta menarik manfaat guna meningkatkan taraf hidup manusia. Menurut Hidayat, kualitas sumber daya manusia sebagai subjek pembangunan disamping dapat menentukan tinggi rendahnya produktifitas juga akan menentukan keberhasilan pembangunan dan produktifitas adalah motor penggerak bagi pembangunan ekonomi.¹

Kondisi kualitas SDM Indonesia, terutama apabila dikaitkan dengan ketenagakerjaan memang perlu diperhatikan dan dicarikan segera upaya peningkatannya. Data yang dipublikasikan oleh *United Nation Development Programme* (UNDP) tahun 2019 memperlihatkan adanya perbaikan angka indeks kualitas SDM (*Human Development Index-HDI*) Indonesia yang berada pada urutan 111 dari 189 negara di dunia dan terkategori sebagai kelompok *Hight Human Development* (UNDP, 2019).² Angka indeks tersebut harus terus-menerus ditingkatkan karena dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia,

¹ Azizah, 2015, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Mutu Hidup Masyarakat Di Provinsi Jambi, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol.15, No.4, hlm.1.

² Hdr.undp.org dalam <http://hdr.undp.org/en/content/2019-human-development-index-ranking>, di akses pada tanggal 30 April 2020 jam 21.00 WIB.

Thailand, Singapura, Brunei Darusalam, dan Filipina posisi HDI Indonesia berada di bawah posisi HDI negara tetangga.

Disisi lain angkatan kerja Indonesia tahun 2019 secara keseluruhan masih didominasi oleh pekerja berlatar belakang pendidikan sekolah menengah dasar (SD) ke bawah 40,52%, 17,86% kategori sekolah menengah atas, sedangkan persentasi yang paling rendah dipegang oleh penduduk yang memiliki tingkat pendidikan Diploma dengan 2,82% dan lulusan universitas 9,75%.³ Data ini memperlihatkan bahwa angkatan kerja Indonesia yang berlatar belakang pendidikan tinggi masih rendah. Pendidikan Tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.⁴

Salah satu faktor penyebab sedikitnya yang berlatar belakang pendidikan tinggi adalah rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) dari sekolah menengah ke perguruan tinggi. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Berikut perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1.1:

³ Indonesiabaik.Id dalam <http://indonesiabaik.id/infografis/profil-pekerja-indonesia-berdasarkan-pendidikan> di akses pada tanggal 30 April 2020 jam 21.00 WIB

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 1 ayat 2

Tabel 1.1
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Indonesia (%)

Partisipasi Pendidikan Formal	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
APK SD/MI	111.63	102.42	104.23	107.63	108.78	109.94	109.20	108.43
APK SMP/MTS	80.35	89.37	89.29	85.69	88.43	90.63	89.98	90.00
APK SM/MA	62.53	64.10	68.45	66.27	73.95	77.39	80.44	82.25
APK Perguruan Tinggi	16.35	18.06	18.85	23.06	25.76	20.89	23.44	25.00

Sumber: Biro Pusat Statistik dalam <https://www.bps.go.id>, 2019.⁵

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) dari Sekolah Menengah Atas ke Perguruan Tinggi masih tergolong rendah meskipun jumlah persentase dari tahun 2010 sampai 2017 mengalami kenaikan. Salah satu faktor penyebab rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) dari Sekolah Menengah ke Perguruan Tinggi adalah akses masyarakat terhadap perguruan tinggi yang masih relatif sulit, baik dari segi pembiayaan maupun jarak yang jauh. Rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) ke Perguruan Tinggi tentu berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Kualitas tenaga kerja sangat tergantung pada kualitas SDM. Oleh karena itu, kualitas SDM harus mendapatkan prioritas utama untuk ditingkatkan dan dikembangkan guna mendapatkan kualitas tenaga kerja yang baik. Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM bagi generasi muda calon tenaga kerja merupakan tanggung jawab dunia pendidikan. Pendidikan merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari proses penyiapan SDM yang berkualitas, tangguh dan terampil. Dengan demikian pendidikan vokasi merupakan salah satu

⁵Dalam <https://www.bps.go.id/statictable/2010/03/19/1525/indikator-pendidikan-1994-2017.html> (Di akses pada 02 Februari 2019 , pukul 22.25 WIB).

jenis pendidikan yang memiliki kaitan sangat erat dengan ketenagakerjaan agar memperoleh calon tenaga kerja yang berkualitas sehingga lebih produktif.

Pendidikan vokasi berbeda halnya dengan pendidikan akademik. Perbedaan terletak pada hakikat kompetensi yang menjadi tujuan pendidikan. Kompetensi yang dibangun melalui program vokasi lebih banyak difokuskan pada pembentukan keterampilan kerja teknis dan operasional sedangkan, pada program akademik kompetensi utama yang dikembangkan adalah penguasaan pengetahuan ilmiah dan pengembangannya melalui pemikiran rasional.⁶

Jadi pendidikan akademik diarahkan pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tanpa masuk ke dalam ranah bidang vokasi secara langsung (secara kurikulum) sedangkan pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu dan berorientasi dunia kerja diselenggarakan di perguruan tinggi berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas.

Menjawab permasalahan yang terjadi salah satu upaya pemerintah dalam pemerataan pendidikan di Indonesia dan meningkatkan kualitas SDM yaitu dibentuknya Akademi Komunitas (AK) sebagai Perguruan Tinggi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 59 ayat 7 dan juga termuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 tahun 2013 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Akademi

⁶ Mohammad Faisal Amir, 2016, *Manajemen Kinerja Perguruan Tinggi*, Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm. 1.

Komunitas pasal 1 ayat 1, dijelaskan bahwa Akademi Komunitas merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus.

Terbitnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mempertegas kedudukan Akademi Komunitas. Pengertian Akademi Komunitas menekankan bahwa Akademi Komunitas didirikan guna memenuhi kebutuhan lokal. Secara spesifik Akademi Komunitas diselenggarakan sebagai upaya perluasan dan jaminan akses pendidikan. Konsep pendidikannya yaitu dengan menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan kearifan lokal atau keunggulan lokal yang terdapat di setiap kabupaten atau kota. Terdapat 3 tujuan penyelenggaraan Akademi Komunitas sebagai berikut :⁷

1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi program diploma 1 dan/atau program studi diploma 2 di kabupaten/kota yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus.
2. Memperluas akses dan pemerataan pendidikan tinggi di kabupaten/kota.
3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia untuk memenuhi tenaga terampil dunia usaha dan/atau dunia industri dengan mengembangkan potensi lokal.

⁷Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2013 Tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Akademi Komunitas, pasal 2.

Dalam persiapan kemandirian Akademi Komunitas diperlukan kerjasama atau kolaborasi antar pihak, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 tahun 2013 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Akademi Komunitas pasal 4 ayat 1, dijelaskan bahwa Akademi Komunitas dapat diselenggarakan atas dasar perjanjian kerjasama antara:

- a. Kementerian bersama pemerintah daerah dengan dunia usaha, dan/atau dunia industri; atau
- b. Masyarakat dengan dunia usaha dan/ atau dunia industri

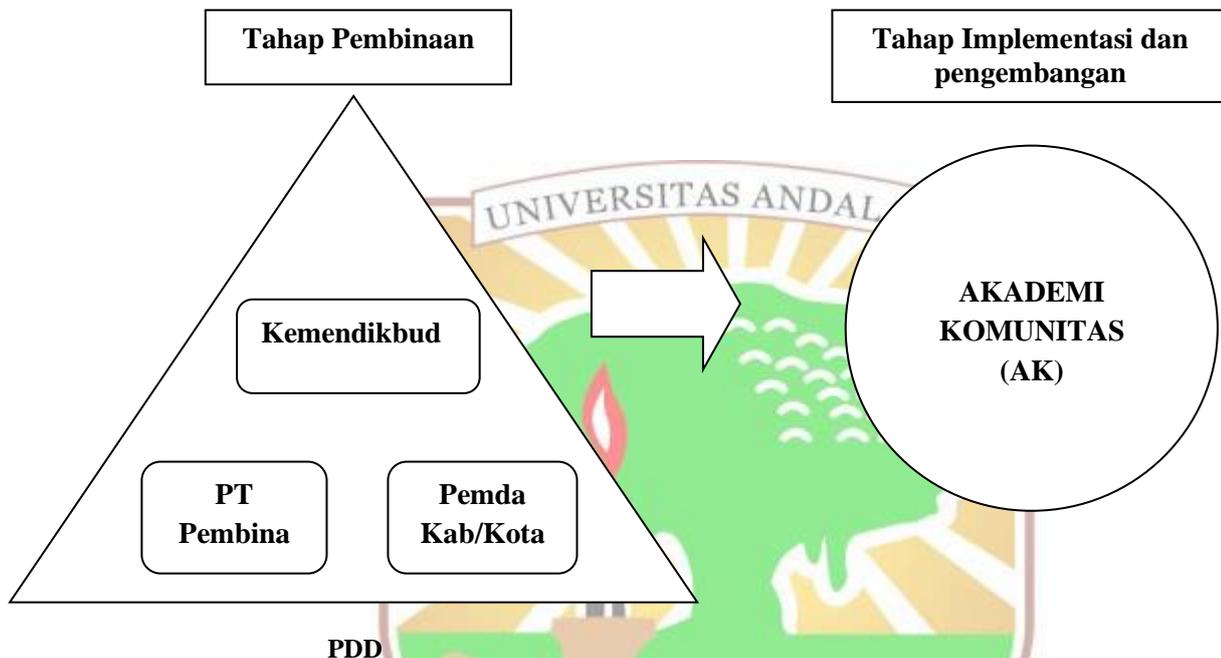
Selanjutnya pada ayat 2, dijelaskan bahwa Kementerian bersama pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus membuat perjanjian kerjasama yang paling sedikit memuat hak dan kewajiban tentang, (a) Sarana dan prasarana, (b) Sumber daya manusia, dan (3) Pendanaan.

Dalam persiapan pendirian Akademi Komunitas ini maka Kementerian menunjuk Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Studi di Luar Domisili sebagai Perguruan Tinggi pembina calon Akademi Komunitas. Berdasarkan Permendiknas Nomor 20 Tahun 2011 menjadi Dasar hukum penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili. Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili yang selanjutnya disingkat PDD adalah pelaksanaan kegiatan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi di luar domisili perguruan tinggi sebagaimana dicantumkan dalam izin pendirian perguruan tinggi dan/atau izin penyelenggaraan program studi yang ditetapkan oleh Kementerian.⁸

⁸ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi, Pasal 1, Ayat 2.

Berikut skema pengelolaan program studi di luar domisili untuk persiapan pendirian Akademi Komunitas:

Gambar 1.1
Skema Pengelolaan Program Studi di Luar Domisili (PDD) untuk
Persiapan Pendirian Akademi Komunitas

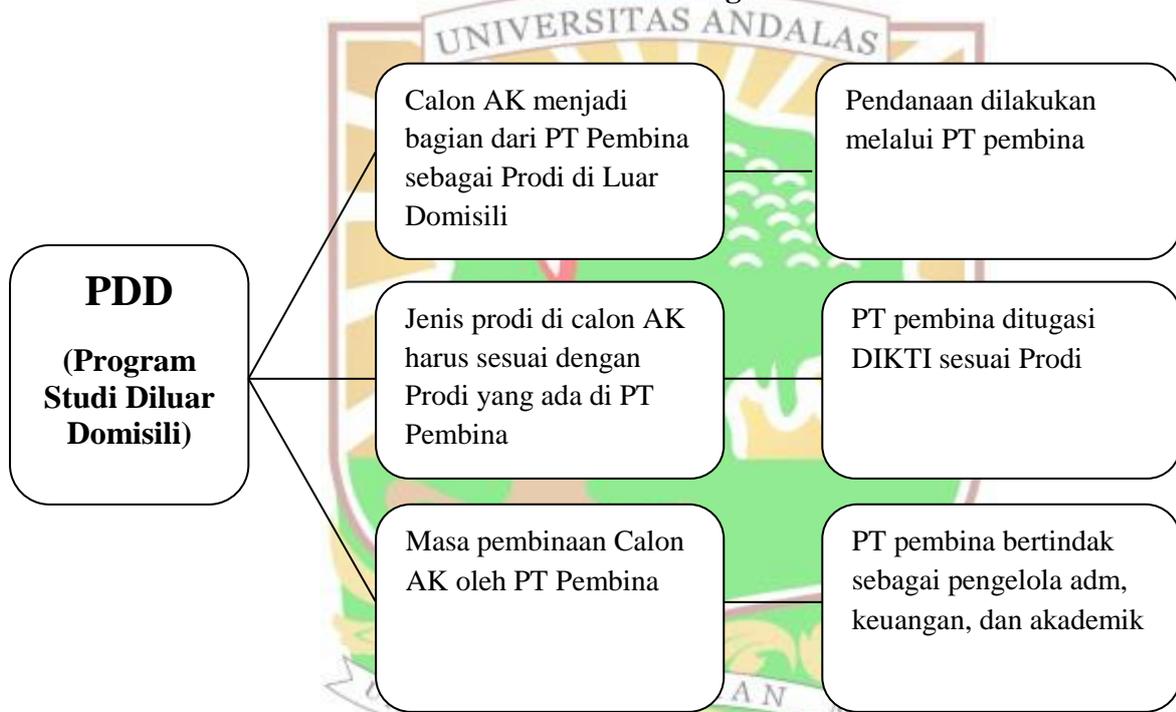


Sumber : Dokumen Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama, 2013.

Berdasarkan Gambar 1.1, dapat dipahami bahwa pihak yang ikut terlibat dalam penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili pada calon Akademi Komunitas terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Perguruan Tinggi Pembina. Pemerintah Pusat melalui Kemendikbud memberikan penugasan atau mandat kepada Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Studi di Luar Domisili untuk membina calon Akademi Komunitas yang kemudian bekerjasama dengan Pemerintah Daerah. Secara umum Kemendikbud bersama Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi Pembina saling berkolaborasi/ bekerjasama untuk

mewujudkan Akademi Komunitas mandiri. Dalam penelitian ini difokuskan pada kolaborasi yang terjadi dilapangan antara Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi Pembina calon Akademi Komunitas. Berikut model pengelolaan Program Studi di Luar Domisili untuk persiapan pendirian Akademi Komunitas di lapangan, seperti pada Gambar 1.2 :

Gambar 1.2
Model Pengelolaan PDD untuk Persiapan Pendirian AK Menggunakan Pola Kemitraan Antara PT Pembina dengan Calon AK dan Pemda



Sumber : Dokumen Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama, 2013.

Berdasarkan Gambar 1.2, dapat dijelaskan bahwa dalam pengelolaan PDD, calon Akademi Komunitas menjadi bagian dari Perguruan Tinggi pembina sebagai Prodi di Luar Domisili dan pendanaannya dilakukan melalui Perguruan Tinggi pembina (DIPA dari pemerintah pusat). Untuk jenis prodi pada calon Akademi Komunitas harus sesuai dengan program studi yang ada di Perguruan

Tinggi pembina, selanjutnya Perguruan Tinggi pembina ditugasi DIKTI sesuai Program Studi. Dan dalam pembinaan calon Akademi Komunitas, Perguruan Tinggi pembina bertindak sebagai pengelola administrasi, keuangan dan akademik.

Amanat UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 59, ditindaklanjuti oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (saat itu) melalui penerbitan Kepmendikbud Nomor 161/P/2012 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Studi di Luar Domisili tanggal 10 Agustus 2012. Berikut persebaran Akademi Komunitas di Indonesia dan perguruan tinggi penyelenggara program studi di luar domisili pada awal dibentuk tahun 2012 seperti pada Tabel 1.2:

Tabel 1.2
Persebaran Pendirian Akademi Komunitas Negeri Tahun 2012
di Indonesia

No	Perguruan Tinggi Penyelenggara	Lokasi AK	Program Studi
1.	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya	1. Kabupaten Ponorogo	<ul style="list-style-type: none"> • D II Teknik Informatika • D II Teknik Mekatronika
		2. Kabupaten Pacitan	<ul style="list-style-type: none"> • D I Animasi • D I Multimedia • D I Teknik Informasi
		3. Kabupaten Sumenep	<ul style="list-style-type: none"> • D II Teknik Informatika • D II Teknik Multimedia
2.	Politeknik Negeri Jember	4. Kabupaten Temanggung	<ul style="list-style-type: none"> • D I Produksi T. Perkebunan • D I Teknologi Industri Pangan • D I Manajemen Informatika
		5. Kabupaten Situbondo	<ul style="list-style-type: none"> • D II Manajemen Informatika • D II Teknologi Industri Pangan
		6. Kabupaten Sidoarjo	<ul style="list-style-type: none"> • D I Teknologi Industri Pangan • D II Manajemen Informatika • D II Manajemen Informatika
		7. Kabupaten Nganjuk	<ul style="list-style-type: none"> • D II Teknologi Industri Pangan • D II Manajemen Informatika
3.	Politeknik Negeri Lampung	8. Kabupaten Muko-muko	<ul style="list-style-type: none"> • D I Agribisnis Pertanian • D I Manajemen Informatika • D I Budidaya Perikanan
		9. Kabupaten Lampung	<ul style="list-style-type: none"> • D II Manajemen Informatika

		Tengah	<ul style="list-style-type: none"> • D I Manajemen Informatika • D I Multimedia
		10. Kabupaten Rejang Lebong	<ul style="list-style-type: none"> • D II Budidaya T. Hortikultura • D II Budidaya Perikanan • D II Teknologi Produksi Ternak
4.	Politeknik Negeri Lhokseumawe	11. Kabupaten Aceh Barat	<ul style="list-style-type: none"> • D II Teknik Mesin • D II Teknik Elektronika • D II Teknik Sipil
5.	Politeknik Negeri Malang	12. Kota Blitar	<ul style="list-style-type: none"> • D II Manajemen Informatika • D II Manajemen Informatika • D II Administrasi Bisnis
		13. Kabupaten Bojonegoro	<ul style="list-style-type: none"> • D II Akuntansi • D II Manajemen Informatika • D II Teknik Otomotif
6.	Politeknik Negeri Padang	14. Kabupaten Tanah Datar	<ul style="list-style-type: none"> • D II Manajemen Informatika • D II Teknik Sipil • D II Teknik Mesin
7.	Politeknik Negeri Semarang	15. Kabupaten Tuban	<ul style="list-style-type: none"> • D I Teknik Elektronika • D I Teknik Informatika
8.	Politeknik Negeri Sriwijaya	16. Kota Prabumulih	<ul style="list-style-type: none"> • D II Teknik Komputer • D II Akuntansi • D II Administrasi Bisnis
9.	Politeknik Negeri Ujung Pandang	17. Kabupaten Keerom	<ul style="list-style-type: none"> • D II T. Komputer dan Jaringan • D II Teknik Otomotif
10.	Politeknik Negeri Kupang	18. Kabupaten Sumbawa	<ul style="list-style-type: none"> • D II Tanaman Pangan dan Holtikultura • D II Teknologi Pangan • D II Peternakan
11.	Politeknik Negeri Bali	19. Kota Mataram	<ul style="list-style-type: none"> • D I Agrowisata • D I Pariwisata • D I Perhotelan
12.	Politeknik Negeri Pertanian Pangkajene Kepulauan,	20. Kabupaten Kolaka	<ul style="list-style-type: none"> • D I Budi daya Perikanan

Sumber : Lampiran Kepmendikbud Nomor 161/P/2012 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Studi di Luar Domisili.

Berdasarkan data pada Tabel 1.2, pada awal dibentuk calon Akademi Komunitas tahun 2012 terdapat 12 Perguruan Tinggi sebagai penyelenggara program studi di luar domisili pada 20 Akademi Komunitas Negeri di seluruh Indonesia dengan jumlah program studi yang beragam di masing-masing Akademi Komunitas. Namun hingga sekarang berdasarkan pernyataan Bapak Sarmiadi, SE, MM selaku Koordinator PDD Politeknik Negeri Padang di seluruh Indonesia sudah mencapai 92 pemerintah daerah yang mengusulkan untuk

mendirikan Akademi Komunitas Negeri (AKN), 27 Akademi Komunitas diantaranya sudah ditutup karena tidak memenuhi syarat sedangkan 4 diantaranya sudah menjadi Satuan Kerja (Satker) atau Perguruan Tinggi Negeri yaitu Kabupaten Pacitan, Kota Blitar, Kabupaten Rejang Lebong, dan Kabupaten Aceh Barat.

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat juga merupakan salah satu daerah yang Angka Partisipasi Kasar (APK) masuk Perguruan Tinggi tergolong rendah, seperti pada Tabel 1.3 :

Tabel 1.3
Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi Sumatera Barat Tahun 2010-2016

Kab/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	APK Menurut Kab/Kota						
Sumatera Barat	25.22	26.91	30.37	33.82	35.27	32.11	34.36

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2019⁹

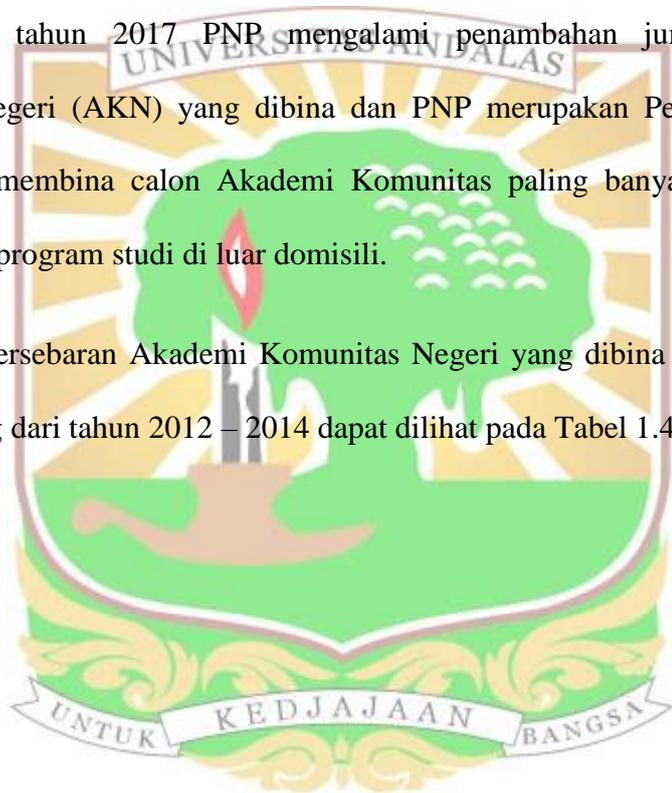
Berdasarkan pada Tabel 1.3, Angka Partisipasi Kasar (APK) masuk Perguruan Tinggi di Kabupaten/Kota Sumatera Barat masih tergolong rendah meskipun jumlah persentase dari tahun 2010 sampai 2016 mengalami kenaikan. Rendahnya Angka Partisipasi Kasar masuk Perguruan Tinggi di Sumatera Barat dilatar belakangi oleh beberapa faktor salah satunya yaitu faktor ekonomi dan akses yang jauh. Dengan demikian khususnya Pemerintah Kabupaten yang jauh dari pusat ibukota Sumatera Barat yang mempunyai kemauan tinggi akan

⁹Dalam <https://sumbar.bps.go.id/dynamictable/2019/01/21/198/angka-partisipasi-kasar-perguruan-tinggi-sumatera-barat-2010-2018.html> (di akses pada 26 September 2019, pukul 20.00 WIB).

hadirnya perguruan tinggi membentuk calon Akademi Komunitas (AK) dan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi yang diinginkan.

Politeknik Negeri Padang (PNP) merupakan salah satu Perguruan Tinggi pertama di Sumatera Barat sebagai penyelenggara program studi di luar domisili pada rintisan Akademi Komunitas Negeri Tanah Datar dengan program studi, yaitu Manajemen Informatika, Teknik Sipil dan Teknik Mesin. Semenjak tahun 2012 hingga tahun 2017 PNP mengalami penambahan jumlah Akademi Komunitas Negeri (AKN) yang dibina dan PNP merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang membina calon Akademi Komunitas paling banyak di Sumatera Barat melalui program studi di luar domisili.

Berikut persebaran Akademi Komunitas Negeri yang dibina oleh Politeknik Negeri Padang dari tahun 2012 – 2014 dapat dilihat pada Tabel 1.4:



Tabel 1.4
Persebaran Akademi Komunitas Negeri Binaan Politeknik Negeri Padang
Tahun 2012 – 2014

Tahun	Lokasi Akademi Komunitas	Program Studi
Gelombang I 2012	AK Tanah Datar	1. Manajemen Informatika 2. Teknik Sipil 3. Teknik Mesin
Gelombang II 2013	AK Solok Selatan	1. Teknik Listrik 2. Teknik Komputer Jaringan 3. Akuntansi
	AK Dharmasraya	1. Teknik Mesin (Fabrikasi dan Pengelasan Logam) 2. Komputer Akuntansi
	AK Pelalawan (Provinsi Riau)	1. Teknik Elektro Industri 2. Manajemen Informatika
Gelombang III 2014	AK Pesisir Selatan	1. Manajemen Informatika 2. Teknik Perawatan dan dan Perbaikan Mesin Listrik 3. Teknik Fabrikasi dan Pengelasan

Sumber : Olahan Peneliti, Kepmendikbud RI tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Studi di Luar Domisili, Tahun 2019.

Berdasarkan data pada Tabel 1.4, menunjukkan bahwa dari tahun 2012 sampai 2014 terdapat 5 Akademi Komunitas Negeri di bawah binaan Politeknik Negeri Padang yang telah didirikan yaitu Akademi Komunitas (AK) Tanah Datar, AK Solok Selatan, AK Dharmasraya, AK Pesisir Selatan dan satu di Provinsi Riau yaitu AK Pelalawan.

Pada tahun 2017 Kemenristekdikti melakukan evaluasi dan penilaian terhadap perkembangan AK di Indonesia, termasuk 5 Akademi Komunitas binaan Politeknik Negeri Padang, yang mana hasilnya dibagi atas tiga kategori, yaitu 1) lanjut, 2) lanjut bersyarat, dan 3) *Passing Out*. Untuk binaan Politeknik Negeri Padang Akademi Komunitas yang berkategori lanjut yaitu AK Solok Selatan dan AK Pesisir Selatan, berstatus lanjut tapi bersyarat yaitu AK Tanah Datar dan AK Pelalawan, sedangkan AK Dharmasraya berstatus *passing out* karena dinilai tidak

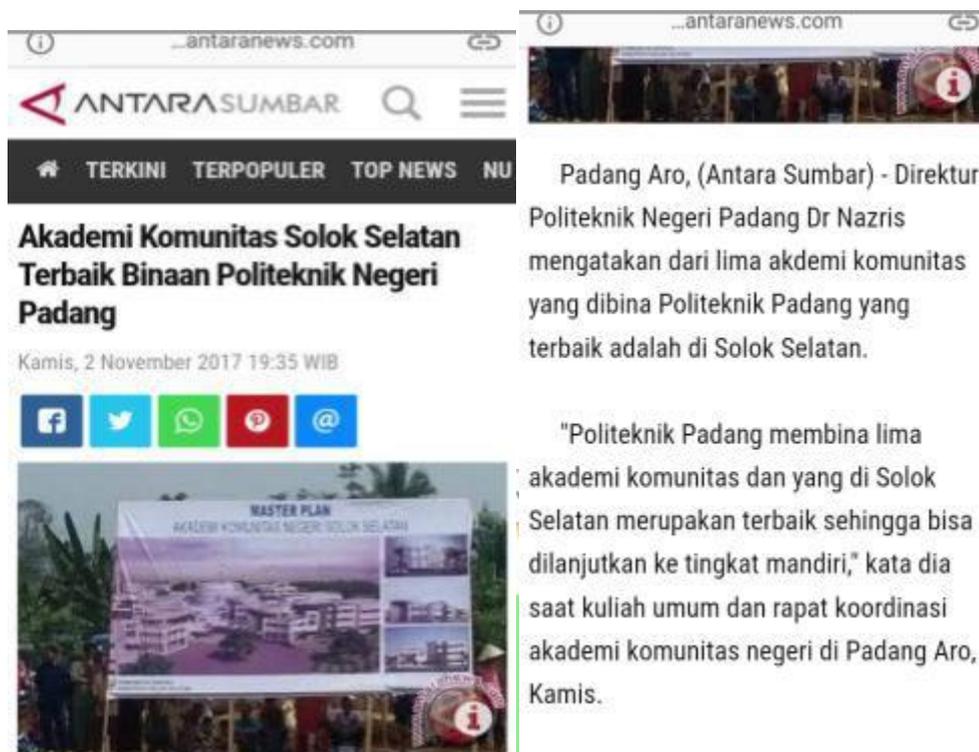
mampu dan gagal dalam pelaksanaannya. Hal tersebut dapat dilihat dari berita online Antara Sumbar di bawah ini:

“ Akademi Komunitas Negeri (AKN) Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, yang telah melaksanakan perkuliahan sejak 2013 terpaksa ditutup, karena tidak mampu menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk mandiri. Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah setempat, Adlisman, mengatakan, penutupan ini berdasarkan evaluasi oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) beberapa waktu lalu. Selain itu hal mendasar ditutupnya karena rendahnya minat siswa untuk melanjutkan kuliah di AKN, ujarnya.”¹⁰

Berita di atas menjelaskan bahwa terdapat beberapa masalah penyebab ditutupnya AKN Dharmasraya seperti belum mampunya menyediakan sarana dan prasarana, dan rendahnya minat siswa untuk melanjutkan kuliah di Akademi Komunitas Negeri Dharmasraya. Penutupan ini juga memperlihatkan sejauh mana komitmen Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Akademi Komunitas. Berhasil atau tidaknya penyelenggaraan Akademi Komunitas tergantung komitmen dari pihak yang terlibat salah satunya yaitu Pemerintah Daerah.

Pada penelitian ini difokuskan pada calon Akademi Komunitas Solok Selatan dimana pada tahun 2017 menjadi Akademi Komunitas Negeri terbaik dari 5 Akademi Komunitas binaan Politeknik Negeri Padang. Seperti yang termuat dalam berita online Antara sumbar.com dibawah ini :

¹⁰Ilka Jenses, 2016, Akademi Komunitas Negeri Dharmasraya di ditutup, dalam <https://sumbar.antarane.ws.com/berita/184207/akademi-komunitas-negeri-dharmasraya-ditutup>(di akses pada 16 januari 2019, jam 10.35 WIB).



Sumber : Media Online Antarasumbar.com, Tahun 2019

Berdasarkan pada berita di atas, dari 5 Akademi Komunitas yang dibina oleh Politeknik Negeri Padang Solok Selatan merupakan yang terbaik. Berdasarkan wawancara awal peneliti dengan Koordinator AK Solok Selatan penilaian ini pada komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan yang dapat dilihat dari segi minat siswa untuk melanjutkan kuliah ke AK Solok Selatan dan kesiapan sarana untuk pembangunan kampus AK Solok Selatan.

Jumlah siswa yang masuk Akademi Komunitas Negeri Solok Selatan sejak awal berdiri setiap tahunnya mencapai syarat yang ditentukan Kemenristek Dikti. Berikut jumlah mahasiswa Akademi Komunitas Negeri Solok Selatan binaan Program Studi di Luar Domisili Politeknik Negeri Padang seperti tabel 1.7:

Tabel 1.5
Jumlah Mahasiswa Akademi Komunitas Negeri Binaan
Politeknik Negeri Padang Tahun 2013-2017

No	Daerah	2012/2013		2013/2014		2014/2015		2015/2016		2016/2017	
		Ganjil	Genap								
1.	Tanah Datar	61	47	74	75	70	69	100	100	142	141
2.	Solok Selatan			111	96	220	196	221	210	224	224
3.	Dharmasraya			71	59	100	76	87	63	29	25
4.	Pelalawan			132	129	157	145	91	73	75	75
5.	Pesisir Selatan					120	100	218	211	261	248

Sumber: Bagian Akademik Program Studi di Luar Domisili Politeknik Negeri Padang, 2019.

Berdasarkan pada Tabel 1.5, dapat dilihat bahwa jumlah mahasiswa yang masuk pada Akademi Komunitas Negeri Solok Selatan program studi di luar domisili Politeknik Negeri Padang dari tahun 2013-2017 mengalami peningkatan setiap tahunnya meskipun tidak terlalu signifikan. Dimana jumlah mahasiswa yang masuk pada tahun 2013 sebanyak 111 mahasiswa dan pada tahun 2017 sudah mencapai 224 mahasiswa. Penjelasan ini juga didukung oleh pernyataan Wakil Bupati Solok Selatan berikut ini:

“ Pembentukan Perguruan Tinggi dalam bentuk Akademi Komunitas ini termasuk pertanggungjawaban moral kami kepada masyarakat. Dan kalau dilihat dari proses selama ini minat mahasiswa juga luar biasa, dan untuk itu kita bersama-sama harus berjuang” (Pernyataan Drs. H. Abdul Rahman, S.H., M.H., Wakil Bupati Solok Selatan dalam rapat antara Pemerintah Solok Selatan dengan Politeknik negeri Padang pada tanggal 20 Februari 2019)

Pernyataan ini juga menunjukkan bahwa Akademi Komunitas Solok Selatan selama ini sudah semakin membaik salah satunya dari segi minat dan jumlah mahasiswa, sehingga hal yang diperlukan kedepannya yaitu pengelolaan secara bersama-sama agar lebih baik lagi, baik dari pihak Pemerintah Daerah maupun pengelola PDD Politeknik Negeri Padang persiapan AK Solok Selatan.

Dalam penyelenggaraan PDD-AK Solok Selatan kerjasama atau kolaborasi antara aktor yang terlibat sangat penting. Berbicara tentang kolaborasi, dipahami sebagai kerjasama antar aktor antar organisasi atau antar institusi dalam rangka pencapaian tujuan yang tidak bisa dicapai atau dilakukan secara *independent*.¹¹ Aktor yang terlibat dalam penyelenggaraan PDD-AK Solok Selatan diantaranya yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan dimana awal sebelum pendirian adanya tim pengusul pendirian Akademi Komunitas di Solok Selatan yaitu BAPPEDA Kabupaten Solok Selatan saat itu (Dr. Syamsurizaldi, S.IP,SE,MM dan Risa Herfina, STP,M.Si) yang berperan aktif selama proses pendirian calon Akademi Komunitas di Solok Selatan yang kemudian setelah adanya calon AK Solok Selatan di bentuk tim pengelolaa AK Solok Selatan yang berasal dari instansi yang berbeda-beda, aktor yang selanjutnya yaitu Pemerintah Nagari Lubuk Malako yang bersedia memberikan tanah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan yang nanti akan diserahkan kepada Dikti seluas 10 Hektar, peran masyarakat yang telah bersedia menjual tanah kepada Pemerintah Nagari untuk pembangunan kampus calon Akademi Komunitas di Nagari Lubuk Malako dan instansi serta pihak swasta yang telah bekerjasama dengan calon Akademi Komunitas Solok Selatan dalam keberlanjutan penyelenggaraan PDD-AK Solok Selatan. Peran dari masing-masing aktor inilah yang mendorong terbentuknya calon Akademi Komunitas Negeri di Kabupaten Solok Selatan.

¹¹ Abdul Sabaruddin, 2015, *Manajemen Kolaborasi dalam Pelayanan Publik; Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 25.

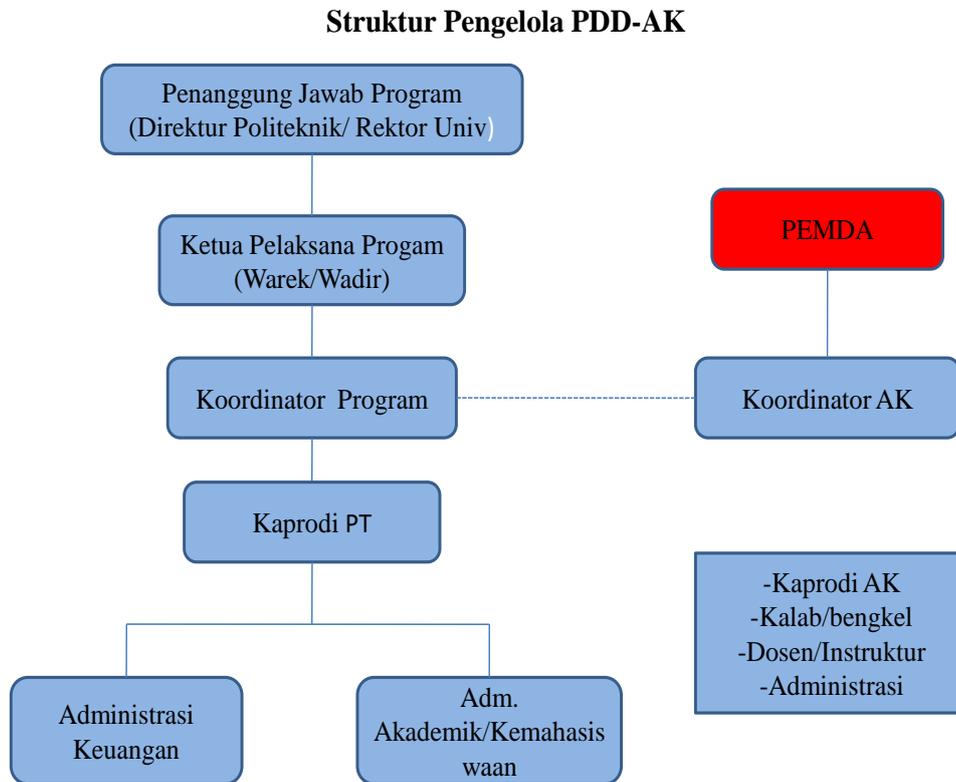
Proses kolaborasi menurut Emerson, Nabatchi, & Balogh (2012) terdiri dari beberapa komponen yaitu dinamika kolaborasi, tindakan-tindakan kolaborasi, dan dampak sementara serta adaptasi sementara dari proses kolaborasi. Tahapan dalam kolaborasi menurut Emerson, Nabatchi, & Balogh ini peneliti jadikan sebagai alat analisis untuk menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan kolaborasi penyelenggaraan program studi di luar domisili Politeknik Negeri Padang pada rintisan Akademi Komunitas Negeri Solok Selatan. Keberhasilan kolaborasi tergantung pada bagaimana siklus kolaborasi itu berputar, mulai dari proses awal terbentuknya kerjasama atau kolaborasi, tindakan-tindakan kolaborasi yang dilakukan serta dampak sementara dari kolaborasi yang dijalankan.

Terbentuknya Akademi Komunitas (AK) merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ada di daerah. Kekayaan potensi sumber daya alam (SDA) yang harus diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM. Meskipun jumlah SDA dan SDM yang dimiliki cukup banyak, namun jumlah lulusan SLTA yang melanjutkan ke perguruan tinggi masih sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi dan jauhnya akses ke perguruan tinggi yang ada di Kota Padang dan kota lainnya.¹²

Berikut struktur kolaborasi penyelenggaraan PDD rintisan Akademi Komunitas pada Gambar 1.3 :

¹² Rozidateno Putri Hanida,dkk, 2017, *Facts About Lubuk Malako Nagari Mandiri di Daerah Tertinggal*, Yogyakarta: Oceania Press, hlm.251.

Gambar 1.3
Struktur Pengelola Program Studi Di Luar Domisili pada Akademi
Komunitas



Sumber: Dokumen Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama, 2013.

Berdasarkan Gambar 1.3 diatas dapat dilihat bentuk struktur pengelolaan Program Studi di Luar Domisili pada Akademi Komunitas secara umum yang terdiri dari Perguruan Tinggi pembina Akademi Komunitas dan Pemerintah Daerah yang mengusulkan pendirian Akademi Komunitas, dimana perguruan tinggi bersama pemerintah daerah saling berkolaborasi dalam penyelenggaraan PDD-AK.

Dalam penyelenggaraan PDD-AK Solok Selatan, Politeknik Negeri Padang sebagai Perguruan Tinggi pembina dan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah membentuk sebuah tim pengelola PDD-AK Solok Selatan berdasarkan Surat

Keputusan (SK) Direktur Politeknik Negeri Padang dan Surat Keputusan Bupati Solok Selatan. Berikut aktor yang terlibat dalam tim pengelola calon Akademi Komunitas Solok Selatan di Daerah seperti Tabel 1.6 :

Tabel 1.6
Tim Pengelola dan Pelaksana Kegiatan Program Studi di Luar Domisili Politeknik Negeri Padang pada Rintisan AK Solok Selatan di Daerah

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	H. Muzni Zakarya, M. Eng	Pembina 1
2.	H. Abdul Rahman, MH	Pembina II
3.	Ir. H. Yulian Efi, MM	Pembina III
4.	Dr. H. Fidel Efendi, S.Pd, MM	Pengarah I
5.	Dr. Syamsurizaldi, S.IP, SE, MM	Pengarah II
6.	Risa Herfina, STP, M.Si	Pengarah III
7.	Drs. Zulkarnaini, MM	Penanggungjawab
8.	Novrizon, S. Pd, M.Si	Koordinator PDD-AK
9.	H. Hamudis, S.Pd	Wakil Koordinator PDD-AK
10.	A.Rahman, M.Pd	Sekretaris
11.	Pamel Liskardani, S.Pd	Anggota
12.	Guslindawati	Anggota
13.	Katrina Flomina G, S.Pd, M. Kom	Kepala Prodi TKJ
14.	Miswardi, S.Pd	Kepala Prodi Teknik Listrik
15.	Allaina Rabbaini, SE	Kepala Prodi Akuntansi
16.	Ulfa Mulkarim, A.Md	Teknisi Prodi Teknik Listrik
17.	Ulfajri Febriko, S.Kom	Teknisi Prodi Akuntansi
18.	Vitri Gustiana	Tenaga Kontrak PDD-AK
19.	Asmir Riansah	Tenaga Kontrak PDD-AK
20.	Harry Fajri	Tenaga Kontrak PDD-AK
21.	Elpa Wisman, S.IP	Tenaga Kontrak PDD-AK
22.	Ninang Sutrisno	Tenaga Kontrak PDD-AK
23.	Nopra Supandi	Tenaga Kontrak PDD-AK
24.	Hisnawati	Tenaga Kontrak PDD-AK

Sumber : Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 420.129-2019 Tentang Pembentukan Tim Pengelola dan Pelaksana Kegiatan Program Studi di Luar Domisili Akademi Komunitas Kabupaten Solok Selatan

Selanjutnya aktor yang terlibat dalam Tim pengelola dan pelaksana PDD-Akademi Komunitas Solok Selatan di Politeknik Negeri Padang pada Tabel 1.7 :

Tabel 1.7
Tim Pengelola dan Pelaksana Kegiatan Program Studi di Luar Domisili
Politeknik Negeri Padang (Persiapan AK Kabupaten Solok Selatan)

NO	NAMA	JABATAN
1.	Surfa Yondri, ST.,SST.,M.Kom	Pengarah
2.	Revalin Herdianto, ST.,M.Sc.Ph.D	Penanggung Jawab
3.	Sarmiadi, SE,MM	Ketua
4.	Dr. Nazris Nazaruddin, ST.,M.Si	Sekretaris
5.	Anton, ST.,MT	Anggota
6.	Junaldi, ST.,M.Kom	Anggota
7.	Maidar, STP.,MM	Anggota
8.	Afrizal Yuhannaf, ST.,M.Kom	Anggota
9.	Amy Fontanella, SE.,M.Si.Ak	Anggota
10.	Budi Warsito, S.Sos	Anggota
11.	Anton Hidayat, ST.,MT	Anggota
12.	Irda Rosita, SE.,M.Ec.St.Ak	Anggota
13.	Hidra Amnur, M.Kom	Anggota
14.	Riza Widia, SST.,MT	Anggota
15.	Fera Sriyunianti, SE.,M.Si	Anggota
16.	Nunu Nurdiana, S.Kom	Anggota
17.	Ruri Derini, SE	Anggota
18.	Novia Septina, SE.,MM	Anggota
19.	Surya Vera Diana, SH	Anggota
20.	Ester, A.Md	Anggota

Sumber : Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Padang Nomor 1106/PL9/DL/2019 Tentang Pengangkatan Tim Pengelola PDD-PNP (Persiapan Akademi Komunitas Kabupaten Solok Selatan)

Berdasarkan pada Tabel 1.6 dan 1.7 di atas, Tim pengelola yang dibentuk baik oleh PNP maupun Pemerintah Daerah saling berkolaborasi atau bekerjasama dalam penyelenggaraan PDD-AK Solok Selatan. Kolaborasi antara dua tim pengelola, Pemerintah Nagari Lubuk Malako, Masyarakat, dan pihak swasta atau instansi lainnya menjadi penentu tercapainya tujuan dari kerjasama yaitu meningkatkan kemampuan di bidang pendidikan seluas-luasnya untuk seluruh program studi yang ada di AK Negeri Solok Selatan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Solok Selatan.

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam keberlanjutan pembangunan Akademi Komunitas memberikan bantuan dana untuk menambah kebutuhan AK. Seperti pernyataan Wakil Bupati Solok Selatan dalam rapat koordinasi dengan Politeknik Negeri Padang sebagai berikut:

“ Kami dan juga masyarakat selama ini memberikan perhatian untuk kampus AK dan berharap banyak supaya berjalan dengan baik, kami juga berkesempatan memberikan perhatian untuk membangun kampus AK dengan mengalokasikan anggaran lebih kurang 5 Milyar untuk pembangunan infrastruktur, fasilitas, dan juga jalan untuk perubahan kedepannya”. (Pernyataan Drs. H. Abdul Rahman, S.H., M.H., Wakil Bupati Solok Selatan dalam rapat koordinasi Pemerintah Solok Selatan dengan Politeknik negeri Padang pada tanggal 20 Februari 2019)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dilihat bahwa, komitmen Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam keberlanjutan penyelenggaraan Akademi Komunitas Solok Selatan sangat besar, dimana Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastuktur dan fasilitas agar Akademi Komunitas Solok Selatan semakin berkembang.

Sementara itu, Dr. Syamsurizaldi, S.IP,SE,MM Dosen Jurusan Administrasi Publik UNAND selaku pendiri dan pengarah, yang serius mendorong perkembangan AK Solok Selatan juga menyebutkan dalam berita online di bawah ini:

“ Saat ini kampus AK sudah direkomendasikan oleh Politeknik Negeri Padang (PNP) untuk segera dimandirikan. Saat evaluasi, AK Solsel merupakan yang terbaik. Namun Setelah mencapai lima tahun adanya AK Solsel ini, kondisinya belum juga populer bagi generasi Solsel sebagai tujuan untuk melanjutkan studi. Hal ini tentu sedikit banyak nantinya akan berdampak kurang bagus bagi keberlangsungan Kampus AK ke depan," kata dia.¹³

¹³Erik Ifansyah Akbar, 2017, dalam<http://valora.co.id/solselkab/berita/11035/akademi-komunitas-solsel-diharapkan-jadi-pilihan-peningkatan-kualitas-anak-nagari.html>(diakses pada 16 januari 2019 jam 11.04 WIB)

Meskipun rintisan Akademi Komunitas Negeri Solok Selatan terbaik diantara 5 Akademi Komunitas binaan Politeknik Negeri Padang, pandangan ini juga dapat dikatakan bahwa sosialisasi Akademi Komunitas di Solok Selatan belum maksimal karena AK belum populer dikalangan generasi muda Solok Selatan sebagai tujuan untuk melanjutkan pendidikan.

Dalam proses kolaborasi penyelenggaraan PDD-AK Solok Selatan pelaksanaan peran masing-masing aktor yang terlibat harus berjalan dengan baik mulai dari penggerakkan prinsip bersama sampai pelaksanaan tindakan atau kegiatan hingga menghasilkan dampak. Selama proses kolaborasi berlangsung ada beberapa masalah yang muncul dilapangan seperti kegiatan pengelolaan keuangan dimana sering terjadi perubahan anggaran ketika kegiatan sudah berjalan. Berikut penjelasan pada penelitian Ester tahun 2018 Politeknik Negeri Padang sebagai berikut:

“Selama ini dalam proses penyusunan anggaran Koordinator dan Ka. Prodi merencanakan dan menyusun kegiatan selama satu tahun. Perencanaan kegiatan yang kurang matang menyebabkan dilakukannya perubahan anggaran atau revisi untuk memaksimalkan realisasi anggaran”¹⁴

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa dalam kegiatan merencanakan dan penyusunan anggaran untuk kegiatan selama satu tahun komunikasi dan koordinasi antara para penyusun anggaran belum berjalan maksimal akibatnya dilakukan lagi upaya revisi untuk merealisasikan anggaran. Dari penjelasan ini peneliti melihat bahwa belum adanya kejelasan peran masing-masing anggota yang terlibat dalam penyelenggaraan PDD-AK terkhusus dalam perencanaan

¹⁴ Ester, 2018, *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Pada Program Studi Diluar Domisili Politeknik Negeri Padang*, Politeknik Negeri Padang, hlm : 40-4.

anggaran. Selanjutnya wawancara peneliti dengan Ketua Program Studi Teknik Komputer Jaringan AK di daerah juga menyebutkan bahwa:

“Kekurangannya itu seperti komunikasi atau koordinasi, semakin banyak kita berhubungan dengan orang prosesnya pasti akan lebih lama contohnya dalam pengambilan keputusan untuk sidang akhir koordinasinya bertingkat harus konfirmasi dulu” (Hasil wawancara dengan Ketua Program Studi TKJKatrina Flomina, S.Pd.,M.Kom pada tanggal 09 Juli 2019).

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa komunikasi yang bertingkat dan menunggu konfirmasi terlebih dahulu membuat proses pengambilan keputusan sedikit lebih lama, dan itu memerlukan komunikasi yang cukup intens agar tidak terlalu berdampak ke mahasiswa. Dalam wawancara ini peneliti juga menemukan bahwa pelatihan untuk para dosen Akademi Komunitas Solok Selatan jarang dilakukan dan hanya dilakukan pada awal penyelenggaraan PDD-AK Solok Selatan.

Keberhasilan kolaborasi penyelenggaraan PDD-AK Solok Selatan juga sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan-kegiatan dilapangan. Namun terlepas dari masalah yang ditemui di lapangan, dampak yang dirasakan oleh masyarakat sangat beragam khususnya bagi mahasiswa, dimana siswa tamatan sekolah menengah yang tidak mampu melanjutkan kuliah ke Perguruan Tinggi di luar daerah Solok Selatan merasa terbantu karena bisa merasakan kuliah di Akademi Komunitas Solok Selatan. Terlepas dari manfaat yang dirasakan oleh mahasiswa muncul beberapa kendala yang dihadapi yaitu ketika mahasiswa yang telah lulus dari Akademi Komunitas dengan gelar DII (Diploma II) sulit untuk melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri..

Berdasarkan uraian dan fenomena-fenomena di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dan memahami lebih mendalam bagaimana proses Kolaborasi Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Politeknik Negeri Padang pada Rintisan Akademi Komunitas Negeri Solok Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

Bagaimana Kolaborasi Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Politeknik Negeri Padang pada Rintisan Akademi Komunitas Negeri Solok Selatan.

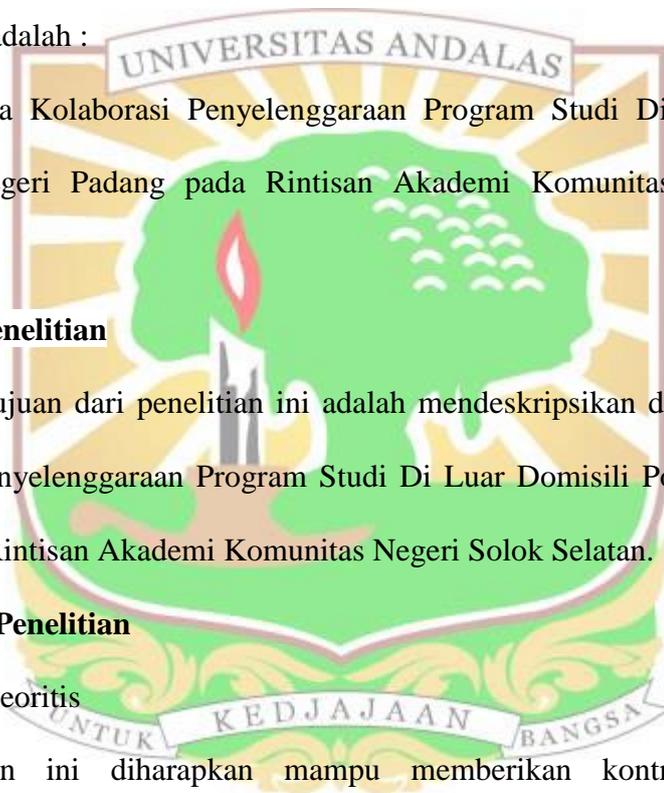
1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis Kolaborasi Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Politeknik Negeri Padang pada Rintisan Akademi Komunitas Negeri Solok Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan Administrasi Publik dan memperkaya ilmu pengetahuan mengenai Kolaborasi Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Politeknik Negeri Padang pada Rintisan Akademi Komunitas Negeri Solok Selatan. Penelitian ini juga berfungsi sebagai bahan referensi atau sebuah acuan yang relevan bagi penelitian selanjutnya untuk meneliti permasalahan yang terkait dengan yang penulis lakukan.



1.4.2 Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terlibat dalam Kolaborasi Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Politeknik Negeri Padang pada Rintisan Akademi Komunitas Negeri Solok Selatan yaitu Perguruan Tinggi Pembina, Pemerintah Daerah Solok Selatan dan Calon Akademi Komunitas Negeri Solok Selatan.

